

## FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PADA KAMPUNG MANGGONSWAN DISTRIK KEPULAUAN ARURI KABUPATEN SUPIORI

Rani Maswati

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak

Email : Rani\_maswati@iyb.ac.id

### Abstrak

*Pelaksanaan pembanguan kampung merupakan pembanguan manusia seutuhnya bagi seluruh masyarakat berdasarkan tujuan pembanguan kampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan pemerintah dalam meningkatkan pembanguan masyarakat pada kampung Manggonswan Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Pengawasan pemerintahan dalam meningkatkan pembanguan pada kampung Manggonswan Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori dikategorikan baik, tetapi kurang maksimal sehingga perlu adanya pengawasan pemerintah terhadap pembanguan yang lebih efektif karena pengawasan pemerintahan kampung adalah hal yang positif dilakukan dalam meningkatkan pembanguan kampung, untuk mencapai hasil yang ingin dicapai oleh sebab itu pemerintah kampung.*

**Kata Kunci:** Fungsi Pengawasan, Pembanguan, Masyarakat.

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya Pembanguan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, pembanguan Nasional senantiasa memperhatikan asas-asas pembanguan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembanguan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bagi pengembangan pribadi warga negara. Pembanguan Nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata disemua lapisan masyarakat, dimana setiap masyarakat berhak memperoleh kesempatan berperan serta dan

menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara, serta menuju pada keseimbangan, keselarasan dalam perikehidupan.

Dalam konteks sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten. Pembanguan kampung di rencanakan dan dilaksanakan sesuai dengan keadaan dan kondisi kampung. Kemampuan untuk berkembang dan kemampuan yang ingin

dicapai secara baik merupakan tujuan dan sekaligus tantangan bagi pemerintah kampung. Pembangunan kampung di arahkan dan dilaksanakan sesuai tujuan pembangunan bagi masyarakat dan keadaan yang dapat di jadikan modal dasar adalah seluruh keadaan dan kemampuan kampung dan hubungan baik.

Pelaksanaan pembagunan kampung merupakan pembangunan manusia seutuhnya bagi seluruh masyarakat berdasarkan tujuan pembangunan kampung dan merupakan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di lakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan pemerintah kampung dengan memanfaatkan kemajuan ilmu yang di miliki dan ilmu pemerintahan yang di tekuni serta memperhatikan tantangan perkembangan dalam pelaksanaan yang mengacu kepada kepribadian kampung dan nilai luhur untuk mewujudkan kehidupan masyarakat kampung yang mandiri dan sejahtera serta moral dan etika sasaran pembangunan adalah terciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri maupun masyarakat kampung yang adil dan makmur berdasarkan sasaran pembangunan kampung.

Salah satu hal penting yang harus di lakukan oleh Pemerintah kampung terhadap pembangunan masyarakat adalah menjalankan fungsinya sebagai pengawas pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan agar pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien, karena tanpa adanya pengawasan terhadap pembangunan dan partisipasi masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan dengan harapan masyarakat pada kampung itu sendiri, dalam rangka melaksanakan

kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Pemerintah melakukan pengawasan langsung terhadap pembangunan, Pemerintah kampung pada hakikatnya adalah merupakan mitra kerja pemerintah daerah yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah kampung bersama masyarakat kampung juga ikut berperan dalam pengawasan pembangunan agar pembangunan terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah kampung sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pembangunan kampung.

Pemerintah kampung dalam melakukan pengawasan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana di ketahui bahwa Kampung Manggonswan adalah merupakan kampung yang berada pada Distrik Kepulauan Aruri maka mengingat kondisi dan keadaan yang ada maka perladanya pengawasan pemerintah yang maksimal agar tujuan dari pelaksanaan pembangunan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada kampung Manggonswan dan juga fungsi pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pula sangat besar agar pembangunan tetap tercapai dengan harapan masyarakat, Pembanguna masyarakat merupakan pembangunan daerah oleh karena itu untuk menjalankan dan meningkatkan pembangunan melalui pemerintah daerah untuk mendorong tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Fungsi pengawasan Pemerintah kampung Manggonswan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar program-program yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan meningkatkan pembangunan masyarakat pada kampung dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan di koordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan mestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Berbagai kepustakaan membahas tentang manajemen, para ahli berpendapat bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen, sebab pengawasan ini juga ditujukan untuk menemukan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugas kemudian memperbaikinya agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan. Pengertian pengawasan menurut Mondy R, Wayne dalam Wasistiono (2001) adalah "Controlling is the process of comparing actual performance with standards and taking any necessary corrective action". Maksudnya adalah pengendalian merupakan proses dalam membandingkan pencapaian standar yang diperlukan tindakan korektif. Menurut Ramli dalam Mardisano (2002) yang mengemukakan bahwa : "pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang

telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.

Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan demikian pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005) yang mengatakan bahwa: Pada pokoknya controlling atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara Sarwoto (dalam Febriani, 2005) mengatakan bahwa: "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang

ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki". Menurut S.P. Siagian, (2006) Pembangunan merupakan suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dari pembangunan dalam rangka pembinaan bangsa. Pendapat diatas menjelaskan pembangunan merupakan suatu usaha perubahan kearah kehidupan yang layak dan lebih baik yaitu mensejahterahkan kehidupan bangsa secara adil dan merata.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan pada Kampung Manggonswan Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis asiosiatif. Penelitian asiosiatif adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono 2009).

### **Sumber Data**

Data penelitian dalam penelitian ini diperoleh melalui Observasi (Pengamatan), dan Interview (wawancara), dokumentasi, dan studi pustaka.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini memakai beberapa bentuk teknik pengumpulan data, yaitu Observasi, Interview, Studi Kepustakaan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan mengola data yang telah dikumpulkan dari lapangan atau kepustakaan untuk menjadi seperangkat hasil, baik dalam penemuan maupun dalam pengelolaan data. Untuk menganalisis data dalam masalah ini penulis menggunakan logika deduksi,

dengan membandingkan teori yang melatar belakangi permasalahan. Data yang diperoleh dari lapangan akan diolah dengan cara pengumpulan semua data yang ada. Data yang ada dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis. Metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang didasarkan pada kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pokok penelitian, kemudian diuraikan dalam bentuk deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Fungsi Pengawasan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Pada Kampung Manggonswan Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori**

Fungsi pengawasan pemerintah kampung dalam meningkatkan pembangunan masyarakat kampung adalah merupakan suatu peran yang sangat penting dalam menunjang pencapaian tujuan yang dapat memberi keberhasilan pembangunan serta penentu kebijakan dari kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam proses pembangunan kampung. Pemerintah kampung dalam menjalankan fungsinya yang dominan, krusial dan kritik, dalam seluruh upaya untuk menunjang pembangunan pada kampung Manggonswan dapat dikatakan demikian karena kinerja Aparat tidak hanya disoroti dari sudut pandang produktifitas kerja para tenaga pelaksana dalam melakukan berbagai kegiatan dan tugas pokoknya sebagai aparat kampung, tetapi juga perlu didukung oleh sumber daya yang memadai Kepala kampung selaku pimpinan di lingkungan pemerintah kampung harus memiliki kapasitas dalam peranya.

Sebagai pimpinan harus dapat mewujudkan hubungan kerja sama dengan penuh tanggungjawab dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu pemerintah kampung mempunyai kewajiban untuk menunjang atau mendukung proses pembangunan pada kampung sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan kampung dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengawasan juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kampung. Pembangunan yang dimaksud yakni realisasi program dan anggaran disemua sektor pembangunan kehidupan masyarakat.

Menurut Siagian (2008) mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni, Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan. Pengawasan ini terbentuk : (a) inspeksi langsung, (b) *on the spot obserfation*, (c) *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi banyaknya dan kompleks tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pemimpin tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung. Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala kampung dan Aparat kampung yang dilakukan pada Kampung Manggonswan

Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori mengenai Pengawasan Langsung pemerintah dalam meningkatkan pembangunan masyarakat pada kampung yang dilakukan sebagai berikut. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut Bagaimana Pengawasan Langsung Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Pada Kampung Manggonswan Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori. Menurut Kepala Kampung Piet Kurni Mengatakan:.

“.....Pengawasan langsung yang dilakukan dari kami sebagai pimpinan pada kampung Manggonswan terhadap pelaksanaan pembangunan adalah merupakan suatu hal yang selalu dilakukan sebagai pemerintah kampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melakukan pengawasan secara langsung kepada pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan atau di kerjakan agar pembangun yang berlangsung berjalan sebagaimana yang diharapkan pemerintah daerah dan masyarakat dan juga agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kampung dan menjamin program-program pemerintah daerah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kaur Pemerintahan Loth Fainsenem mengatakan:

“.....Pengawasan langsung yang dilakukan pemerintah kampung adalah selalu mengawasi setiap pekerjaan yang dikerjakan atau

dilaksanakan agar tujuan dari pembangunan yang berjalan atau berlangsung berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang ingin di capai yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kampung manggonswan agar lebih sejahtera dan mandiri.

Menurut Kaur Umum Yosef Sawen Mengatakan:

“Selama ini kami sebagai aparat kampung dalam pelaksanaan pembangunan melakukan pengawasan langsung terhadap pembangunan agar menjamin setiap program-program pemerintah daerah yang berjalan terlaksana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku juga disamping meningkatkan pembangunan masyarakat pada kampung Manggonswan.

Menurut Siagian (2008) mengungkapkan bahwa Pengawasan tidak langsung (indirect control) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan bawahan. Laporan itu dapat berbentuk (tertulis), (b) lisan, kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinannya.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala kampung dan aparat kampung yang dilakukan pada Kampung Manggonswan Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori mengenai Fungsi Pengawasan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembangunan

Masyarakat Pada Kampung Manggonswan yang dilakukan sebagai berikut. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut Bagaimana Pengawasan tidak Langsung Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Pada Kampung Manggonswan Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori.

Menurut kepala kampung Piet Kurni Mengemukakan bahwa:

“.....Pengawasan tidak langsung adalah merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini menyebabkan beberapa program pembangunan tidak berjalan dengan baik karena pemerintah tidak melakukan pengawasan langsung terhadap pembangunan yang berjalan.

Menurut Kaur Pemerintahan Loth Fainsenem Mengemukakan:

“.....Pengawasan tidak langsung dari pemerintah kampung adalah tidak mendatangi pelaksanaan pembangunan atau tidak melakukan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat sehingga ada beberapa pembangunan yang belum terselesaikan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk pertanyaan yang diajukan kepada Kepala kampung dan aparat kampung tentang pengawasan dalam meningkatkan pembangunan masyarakat kampung manggonswan adalah sudah berjalan sehingga terbukti pembangunan berjalan dengan baik tetapi karena disamping tidak adanya pengawasan langsung juga sehingga menyebabkan

beberapa program yang dikerjakan belum terlaksana dengan baik maka perlu adanya pengawasan yang maksimal dari pemerintah kampung agar pembangunan berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai.

### **B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kampung Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Masyarakat Pada Kampung Manggonswan.**

Pemerintah Kampung selaku pimpinan di kampung harus selalu melakukan upaya-upaya yang tidak merugikan rakyat banyak seperti dalam memahami aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Hal seperti inilah yang selalu mendapatkan maknanya, karena dari segala bentuk pembangunan yang dilakukan baik itu berasal dari jalur pemerintahan, pemimpin maupun secara kemasyarakatan lewat aspirasi yang disampaikan atau diberikan oleh rakyat atau masyarakat, bila dalam proses pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan menenga atau sesuai dengan harapan, maka pemerintah dalam hal ini kepala Kampung dalam pelaksanaan tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif dari masyarakat.

Untuk mengakses pembangunan Kampung Manggonswan dengan mencermati dan memperhitungkan potensi dan masalah maka ditetapkan 3(tiga) program utama yang nantinya diharapkan dapat menjadi pengarah utama jalannya roda pemerintahan, pembangunan kampung serta dapat memberikan akses penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dibidang lain. Program dimaksud antara lain :

1. Program pembangunan Sumber Daya Manusia.
2. Program penyelenggaraan pemerintah Kampung yang baik dan bersih.
3. Program pembangunan lingkungan hidup.

Disamping program utama di atas, sambil memperhatikan kondisi, kebutuhan, pelayanan masyarakat secara sistematis maupun komperhensif dalam satu kesatuan, maka ada beberapa program pembangunan kampung yang merupakan penjabaran dari 3(tiga) program utama yan di atas yang meliputi :

1. Bidang pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Sarana dan prasarana.

Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan, kepala Kampung harus benar-benar dapat mensosialisasikan kepada setiap anggota masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan tersebut dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya, sehingga kebijakan tersebut yang sudah dilaksanakan di satu pihak tidak merugikan ataupun menghambat program pemerintah dan dilain pihak juga masyarakat merasa aspirasi mereka didengar dan sekaligus dilaksanakan serta tidak merasa dirugikan oleh pemerintah setempat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikutungsi Pengawasan pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan pada kampung Manggonswan Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori dikategorikan baik, tetapi kurang maksimal sehingga perlu adanya pengawasan pemerintah terhadap

pembangunan yang lebih efektif karena pengawasan pemerintahan kampung adalah hal yang positif dilakukan dalam meningkatkan pembangunan kampung, untuk mencapai hasil yang ingin dicapai oleh sebab itu pemerintah kampung dan aparat kampung harus melakukan pengawasan yang lebih derius terhadap program-program pembangunan agar pembangunan dapat tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar (2005) *Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah. Prestasi Pustakaraya. Jakarta.*
- Anwar, A. 2005. *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan : Tinjawan kritis. P4W-Press Bogor.*
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefulla, *Pengantar Manajemen,, Kencana Prenada Media Groarta 205.*
- Kartono, Kartini, 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta : Raja Grafindo.*
- Maman ukas. 2004, *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi". Cetakan Ketiga, AGNINI BANDUNG.*
- Mardisano, 2002. *"Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", Penerbit Andi Yogyakarta.*
- Mondy R, Wayne dalam Wasistiono (2001 : 90) *Manajemen Sumberdaya Manusia Jakarta. Erlangga.*
- Ndraha, Talizuduhu, 2005. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta : Bumi Aksara.*
- Siagian, Sondang, P, 2006 *Teori dan Kepemimpinan, Penerbit Rineka Cipta Jakarta.*
- Siagian, Sondang, P, 2006, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi Penerbit Gunung Agung, Jakkarta.*
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.*
- Wijaya, H. A. W, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo*